

Poverty Reduction Strategy Through Food Security During The Covid 19 Pandemic In Banjar City

Nada Ulfah Avionita ¹ida Widianingsih ²Ramadhan Pancasilawan ³

^{1,2,3} Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Padjadjaran University

E-mail Koresponden : nada16002@mail.unpad.ac.id
 ida.widianingsih@unpad.ac.id
 ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id

ABSTRACT

Poverty is a condition of economic inability to meet the standard of living of the average community in an area. This inability condition is characterized by the low ability of income to meet basic needs in the form of food, clothing, and housing. This low income ability will also have an impact on reducing the ability to meet average living standards such as public health standards and education standards (Wini, 2010:21). The city of Banjar has the potential for agricultural natural resources to be developed which is supported by the population based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the population of Banjar City who is in the poverty line is 5.70 percent, meaning that the agricultural sector has not been able to save the people of Banjar City in alleviating poverty. The city of Banjar, like other regions in Indonesia, must be able to help make this happen by prioritizing its food security, that national food security is the main key in facing the next crisis period after the corona pandemic outbreak ends. All countries in the world in the recovery period will begin to build their own food strength by increasing agricultural production.

Keywords: Poverty, Banjar City, Food Security, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Global Poverty atau kemiskinan global adalah fenomena multidimensi dan berkembang yang menyentuh semua aspek kehidupan manusia dalam konteks pribadi, sosial, politik, dan ekonominya. Sulit untuk dianalisis karena sangat terkait erat dengan banyak masalah lain, seperti kelaparan, gender, etnis, lokasi, budaya, dan pendidikan. Saling ketergantungan ini membuat sulit untuk menentukan penyebab pasti kemiskinan. Namun demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa kekurangan uang masih merupakan akar utama kemiskinan, dengan buta huruf dan kurangnya akses ke air bersih berada di belakang. Untuk itu dapat disimpulkan, kemiskinan adalah hasil persaingan antara kelompok sosial yang berbeda untuk sumber daya ekonomi dan dominasi politik. Yang kalah dalam persaingan ini berakhir dengan lebih sedikit makanan, lebih sedikit properti, lebih sedikit pendapatan, dan pada akhirnya, lebih sedikit kesempatan untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan pembangunan manusia yang sama sebagai pemenang. Tidak bisa diingkari bahwa kemiskinan global merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum berhasil dipecahkan secara menyeluruh, dalam pengertian tidak ada lagi manusia yang terposisikan di bawah standard hidup layak.

Berbagai penyebab kemiskinan telah dirumuskan dari sifat manusia tertentu yang tidak mau atau tidak mampu berusaha sampai dengan adanya upaya struktural yang memang merupakan kesengajaan. Ada beberapa program yang berusaha untuk mengatasi kemiskinan global tetapi belum menunjukkan hasil atau bahkan semakin meningkatkan kadar kemiskinan. Kemiskinan merupakan akibat dari krisis yang terjadi karena berbagai hal. Permasalahan kemiskinan menjadi isu yang sangat kompleks bagi negara, terutama negara berkembang. Keprihatinan terhadap hal ini dibentuklah United Nations Development Programme (UNDP) sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimandatkan dalam menanggulangi masalah-masalah yang dialami oleh negara-negara berkembang.

Organisasi internasional ini membantu mencapai pemberantasan kemiskinan, dan

pengurangan ketidaksetaraan dan diskriminasi. United Nations Development Programme (UNDP) membantu negara-negara untuk mengembangkan kebijakan, keterampilan kepemimpinan, kemampuan bermitra, kemampuan kelembagaan dan membangun ketahanan untuk mempertahankan hasil pembangunan. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa.

Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran. Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara-negara lain. Namun, di balik keadaan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin. Namun demikian seperti pernyataan di atas tadi bahwa kemiskinan di negara maju tentu relatif berbeda dengan di negara terbelakang seperti di Indonesia.

Di Indonesia tekanan kemiskinan selain tidak menerima fasilitas kehidupan modern tetapi kebutuhan dasar (basic need) masih menjadi problema serius. Dan dalam waktu akhir-akhir ini banyak berita media massa mengekspos kondisi masyarakat miskin yang semakin ke arah kebutuhan dasar saja seperti makan, sandang, papan, berarti menunjukkan kondisi kemiskinan sekarang semakin buruk dari kemiskinan pada tahun-tahun sebelumnya. Masalah kemiskinan bukan hanya melibatkan negara dunia ketiga melainkan juga negara yang sedang berkembang. Hal ini karena disamping kemiskinan berkaitan dengan orang yang tidak mampu membiayai

hidupnya secara layak (kemiskinan absolut) namun juga berkaitan dengan perbandingan yang timpang antara penduduk berpenghasilan tinggi dengan penduduk berpenghasilan yang paling rendah, masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu hal yang menghambat proses pembangunan sebuah negara. Salah satu negara yang masih dibelit oleh masalah sosial ini salah satunya adalah Indonesia.

Angka kemiskinan di tingkat masyarakat masih cukup tinggi. Meskipun oleh lembaga statistik negara, selalu dinyatakan bahwa setiap tahun angka kemiskinan cenderung menurun. Keragaman antarwilayah merupakan ciri khas Indonesia, diantaranya tercerminkan dengan adanya perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, terdapat sekitar 57 persen dari penduduk miskin di Indonesia yang juga seringkali tidak memiliki akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar: hanya sekitar 50 persen penduduk miskin di pedesaan mempunyai akses terhadap sumber air bersih, dibandingkan dengan 80 persen bagi penduduk miskin di perkotaan. Tetapi yang penting, dengan melintasi kepulauan Indonesia yang sangat luas, akan ditemui perbedaan dalam kantong-kantong kemiskinan di dalam daerah itu sendiri. Misalnya, angka kemiskinan di Jawa/Bali adalah 15,7 persen, sedangkan di Papua adalah 38,7 persen. Pelayanan dasar juga tidak merata antar daerah, karena kurangnya sarana di daerah-daerah terpencil. Di Jawa, rata-rata jarak rumah tangga ke puskesmas terdekat adalah empat kilometer, sedangkan di Papua 32 kilometer. Sementara itu, 66 persen kuintil (kelompok perlima) termiskin di Jawa/Bali mempunyai akses terhadap air bersih, sedangkan untuk Kalimantan hanya 35 persen dan untuk Papua hanya 9 persen. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, yakni walaupun tingkat kemiskinan jauh lebih tinggi di Indonesia bagian Timur dan di daerah-daerah terpencil, tetapi kebanyakan dari penduduk miskin hidup di Indonesia bagian Barat yang berpenduduk padat. Contohnya, walaupun angka kemiskinan di Jawa/Bali relatif rendah, pulau-pulau tersebut dihuni oleh 57 persen dari jumlah total penduduk miskin Indonesia, dibandingkan dengan Papua, yang hanya memiliki 3 persen dari jumlah total penduduk miskin.

Mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah memiliki peran yang besar. Namun

dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan ini. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Seperti di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan bakar gas. Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Bahkan beberapa pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah kemiskinan di Indonesia. Negara wajib menyediakan jaminan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Langkah langkah tersebut harus ditujukan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara maka pemerintah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama. Hal tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 dan selaras dengan kesepakatan global dalam mewujudkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016, pertama menyatakan bahwa pemerintah masih memerlukan upaya yang lebih optimal dalam mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu pemerintah bertujuan menurunkan kemiskinan sampai pada angka 8,5-9,5% hingga tahun 2017 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk mendukung visi dan misi pemerintah dalam menanggulangi

kemiskinan di Indonesia. Kedua, bahwa Jumlah masyarakat miskin di Kota Banjar sampai dengan tahun 2017 terdapat pada angka 7 %, atau dibawah angka rata-rata kemiskinan tingkat nasional.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak semata merupakan tanggung jawab pemerintah pusat namun peranan pemerintah daerah juga sangat berpengaruh dalam membantu percepatan penurunan tingkat kemiskinan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan. Untuk itu perlu perumusan masalah kemiskinan yang lebih komprehensif di masing-masing daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Banjar yang berada di garis kemiskinan sebanyak 5,70 persen. Dari sekitar 11,5 ribu jiwa penduduk miskin sesuai hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Maret 2018, bisa diasumsikan rata-rata berusia produktif. Dampak mewabahnya pandemi Covid-19 menyebabkan angka warga miskin di Kota Banjar naik 0,54 persen. Sehingga Kota Banjar alami krisis kemiskinan, demikian permasalahan penanganan kemiskinan di Kota Banjar diantaranya: pertama, data jumlah penduduk miskin tidak akurat, dimana jumlah individual yang tercatat hasil pendataan dari BPS dengan kenyataan di lapangan berbeda, kedua, program dan kegiatan penanganan masalah kemiskinan di Kota Banjar tidak sinergis antara satu OPD dengan OPD yang lain, dan ketiga, penanganan kemiskinan belum menjadi prioritas penanganan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menurut J. W. Creswell pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial (Creswell, 2014) dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan Informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-

foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan (Sugiyono, 2005:83). Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa buku-buku, jurnal, laporan yang berhubungan dengan isu yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal 1990-an, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusun agenda global untuk memecahkan masalah paling mendesak yang dihadapi dunia saat ini dan merangkumnya dalam Deklarasi Milenium. Salah satu pernyataan dalam deklarasi, yang diterima di Sidang Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2000. Berdasarkan pernyataan dalam deklarasi tersebut, PBB mengembangkan delapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) khusus untuk dicapai pada tahun 2015 atau 2020, yang pertama tujuan pembangunan milenium adalah untuk “Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem.” Lebih khusus lagi, ini bertujuan untuk mengurangi jumlah orang yang hidup dengan kurang dari \$1 per hari menjadi 14,2 persen dari semua orang yang hidup di luar negara maju pada tahun 2015, atau setengah dari tingkat tahun 1990. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi jumlah orang yang menderita kelaparan hingga 50 persen pada tahun 2015.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Ia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembangunan nasional.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Ia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak ditanggulangi akan dapat mengganggu pembangunan nasional.

Selain itu, kemiskinan juga boleh dijadikan senjata yang mampu memusnahkan manusia dan negara. Mengambil contoh dalam percaturan politik dunia, ekonomi sering dijadikan senjata bagi meruntuhkan sebuah kerajaan yang memerintah. Buktinya, apa yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998, akibat spekulasi di pasaran mata uang antara bangsa. Gambaran tersebut akhirnya memunculkan pemikiran Ragnar Nurske, bahwa kemiskinan ditengarai adanya lingkaran setan (*the vicious circle of poverty*). Jadi lingkaran setan menggambarkan bahwa tidak adanya ujung pangkal penyebab kemiskinan, apakah karena investasi rendah, kekurangan modal, rendahnya produktifitas, pendapatan rendah dan seterusnya. Demikian akhirnya semua hanya berputar tanpa ada pangkal yang bisa ditunjuk sebagai sebabnya (Hudiyanto, 2001)

Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara maka pemerintah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama. Hal tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 dan selaras dengan kesepakatan global dalam mewujudkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak semata merupakan tanggung jawab pemerintah pusat namun peranan pemerintah daerah juga sangat berpengaruh dalam membantu percepatan penurunan tingkat kemiskinan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan.

Kota Banjar pada tahun 2020 tercatat kenaikan sebanyak 0,54 persen kemiskinan masyarakat Kota Banjar. Di antaranya

pemicunya adalah pandemi Covid - 19 yang berdampak luas menggerogoti semua sektor, termasuk ekonomi masyarakat. Menurut Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjar semakin bertambahnya warga miskin baru, karena tak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan karena terbatasnya pergerakan sektor ekonomi jika dibandingkan dengan biasanya sebelum pandemi Covid19, namun demikian permasalahan penanganan kemiskinan di Kota Banjar diantaranya: pertama, data jumlah penduduk miskin tidak akurat, dimana jumlah individual yang tercatat hasil pendataan dari BPS dengan kenyataan di lapangan berbeda, kedua, program dan kegiatan penanganan masalah kemiskinan di Kota Banjar tidak sinergis antara satu OPD dengan OPD yang lain, dan ketiga, penanganan kemiskinan belum menjadi prioritas penanganan (Muhtar, 2019)

Disisi lain, sektor yang dominan menyerap tenaga kerja di Kota Banjar adalah sektor pertanian secara keseluruhan, Sektor pertanian merupakan sektor yang eksis pada krisis apapun. Itu tandanya pertanian menjadi kekuatan negara. Karena makan tidak bisa ditunda dan makan tidak bisa menunggu hari dan ini menjadi pekerjaan yang tidak pernah putus. Selain itu sektor pertanian menjadi solusi nyata terhadap dampak yang diakibatkan pandemi Covid-19, terutama dengan melemahnya ekonomi nasional. Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu merupakan hak azasi yang layak dipenuhi. Sesungguhnya secara deskriptif kemiskinan sangat berkaitan dengan ketahanan pangan khususnya kerawanan pangan merupakan fenomena sosial yang menjadi isu pembangunan berbagai daerah di Indonesia.

Kemiskinan dan kerawanan pangan merupakan dua buah fenomena sosial yang saling terkait. Di tengah kondisi ini, produksi pertanian harus tetap berjalan dengan baik. Untuk menjaga ketahanan pangan untuk itu pertanian harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan jumlah tingkat kemiskinan di Indonesia. Lebih jauh, Indonesia memiliki cita-cita menjadi Lumbung Pangan Dunia pada 2045. Berdasarkan kenyataan tersebut masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh

penduduk setiap saat di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Kota Banjar, seperti halnya daerah lain di Indonesia, harus dapat membantu mewujudkan hal ini dengan mengedepankan ketahanan pangannya, bahwa ketahanan pangan nasional menjadi kunci utama dalam menghadapi masa krisis selanjutnya setelah wabah pandemi corona ini berakhir. Seluruh negara di dunia di masa pemulihan nanti akan mulai menyusun kekuatan pangannya masing masing dengan meningkatkan produksi pertanian. Kondisi tersebut membuktikan bahwa sektor pertanian mampu membantu mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini juga dijelaskan oleh McCulloch, pertanian dilihat sebagai sektor kunci untuk hampir semua analisis kemiskinankarena mayoritas penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan pertanian sering menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat miskin dan masyarakat pertanian, serta menjadi tumpuan di dalam perekonomian pedesaan (Winters, & Irera, 2001).

Kota Banjar memiliki profil kompetitif. Wilayah ini surplus beras. Dengan luasan sawah 3.311 hektare, Kota Banjar mampu menghasilkan padi sebesar 41.170 ton. Dari total panen padi tersebut, Kota Banjar mampu menyisihkan panennya hingga 13,5 ribu ton. Surplus tersebut lalu dijual ke wilayah lain Jawa Barat, seperti Ciamis dan Pangandaran. Beras surplus Kota Banjar bahkan mengisi pasar Cilacap yang berada di Jawa Tengah (Media Indonesia, 2021). Komoditi pertanian lainnya seperti sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan, juga ada di Kota Banjar. Komoditi sayuran, tercatat pada tahun 2020 komoditi ketimun merupakan komoditi yang paling banyak di hasilkan yaitu mencapai 5.045 Kwintal dari panen sebanyak 81 Ha. Sementara produksi paling sedikit di tahun 2020 adalah komoditi labu slam yang menghasilkan 44 Kwintal dari luas panen 2 Ha. Sementara pada kelompok buah-buahan, komoditas pisang merupakan komoditi yang paling banyak dihasilkan pada tahun 2020 yaitu mencapai 99.172 kwintal. Sedangkan komoditi yang paling sedikit produksinya adalah manggis yaitu hanya sebanyak 7 kwintal saja. Komoditas pertanian lainnya yang tidak kalah penting dalam kontribusi nya terhadap sektor pertanian yaitu

tanaman obat-obatan. Tercatat luas tanaman obat-obatan di Kota Banjar seluas 47.249 M2 yang ditanami sebanyak 6 komoditi tanaman obat-obatan. Tanaman jahe, kunyit, laos/ lengkuas dan kapolaga merupakan tanaman obat-obatan yang memiliki produksi besar. Tercatat tanaman kunyit menghasilkan produksi terbesar sebanyak 33,8 ton. Kecamatan Pataruman memberi kontribusi terbanyak terhadap produksi tanaman kunyit ini yaitu sebanyak 28,1 ton dengan luas panen 14.908 M2 (Banjar Dalam Angka Tahun 2020).

Mengamati karakter wilayah dan tata guna lahan di setiap kecamatan di Kota Banjar, maka tampak sekali bahwa secara alami masing-masing wilayah mensuplai komoditi spesifik yang mendukung berjalannya agribisnis. Kebijakan ketahanan pangan nasional sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kebijakan yang dirumuskan diselaraskan dengan isu global yang disepakati dalam Pertemuan Puncak Pangan Dunia tahun 2002 (World Food Summit-five years later: WFS-fyl) yaitu mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan mengikis kelaparan di seluruh dunia. Berdasarkan fakta inilah maka, jika saya menjadi seorang Bupati Banjar upaya untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional dan agar terus mendorong pertumbuhan sektor pertanian di Kota Banjar penting dilakukan dalam kaitannya dengan menekan laju penduduk miskin. Mengingat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah membentuk ketahanan pangan dengan pembentukan cluster komoditas pertanian di Kota Banjar serta mengarahkan sektor pertanian pada komoditas yang tergolong high value added dengan membuat Laboratorium uji tumbuhan sehingga produk pertanian yang dihasilkan petani Kota Banjar memenuhi standar tidak hanya nasional tetapi menjangkau Internasional, kemudian mengadopsi Program khusus untuk ketahanan pangan (*Spesial Program for Food Security/SPFS*) di Kota Banjar.

Program khusus untuk ketahanan pangan (*Spesial Program for Food Security/SPFS*) merupakan program *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang dilaksanakan di

negara-negara kurang maju atau kekurangan pangan. Di Indonesia, SPFS merupakan program kerjasama Departemen Pertanian dengan Pemerintah Jepang yang dikelola oleh FAO sebagai trust fund. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan nasional melalui upaya peningkatan produksi pertanian, kesempatan kerja, dan pendapatan penduduk di perdesaan. Arah kegiatan ini antara lain untuk (Rusastra et al., 2008; Saptana et al., 2009): (1) memotivasi masyarakat dalam meningkatkan produksi dan produktivitas dalam memperkuat ketahanan pangan wilayah secara partisipatif, (2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pembangunan ketahanan pangan, dan (3) memperkuat kelembagaan masyarakat atau komunitas lokal diikuti dengan pengembangan kelompok tani dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pemantapan Program SPFS.

KESIMPULAN

Banyak penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Angka kemiskinan nasional ‘menyembunyikan’ sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional. Hampir 41 persen dari seluruh rakyat Indonesia hidup di antara garis kemiskinan 1 dan 2 dolar AS per hari suatu aspek kemiskinan yang luar biasa dan menentukan di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa perbedaan antara penduduk miskin dan yang hamper miskin sangat kecil, menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan hendaknya dipusatkan pada perbaikan kesejahteraan mereka yang masuk dalam dua kelompok kuintil (perlima) berpenghasilan paling rendah. Hal ini juga berarti bahwa kerentanan untuk jatuh miskin sangat tinggi di Indonesia. Tiga cara untuk membantu mengangkat diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan belanja negara. Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri utama kemiskinan di Indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multi-dimensi dan ketimpangan antar daerah. Kota Banjar pada tahun 2020 tercatat kenaikan sebanyak 0,54 persen kemiskinan masyarakat

Kota Banjar. Di antaranya pemicunya adalah pandemi Covid-19 yang berdampak luas menggerogoti semua sektor, termasuk ekonomi masyarakat. Menurut Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjar semakin bertambahnya warga miskin baru, karena tak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan karena terbatasnya pergerakan sektor ekonomi jika dibandingkan dengan biasanya sebelum pandemi Covid-19. Pemerintah telah mengumumkan beberapa paket untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat miskin, diantaranya mengamati karakter wilayah dan tata guna lahan di setiap kecamatan di Kota Banjar, maka tampak sekali bahwa secara alami masing-masing wilayah mensuplai komoditi spesifik yang mendukung berjalannya agribisnis. Kebijakan ketahanan pangan nasional sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kota Banjar. Dengan adanya tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan dihadapkan pada tingginya pertumbuhan permintaan pangan, sedangkan pertumbuhan produksi atau penyediaannya lebih lambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Blowfield, M. (2007). Globalization and poverty. In *Business Strategy Review* (Vol. 18). <https://doi.org/10.1111/j.1467-8616.2007.00497.x>
- Circle, T. V., Author, P., Source, B., & Url, S. S. (2015). *The Vicious Circle of Poverty*. 95(1965), 4–20.
- De Haan, A. (2007). Reclaiming social policy: Globalization, social exclusion and new poverty reduction strategies. In *Reclaiming Social Policy: Globalization, Social Exclusion and New Poverty Reduction Strategies*. <https://doi.org/10.1057/9780230592285>
- Fauzia, U., Adyatma, S., & Arisanty, D. (2019). Analisis Komoditas Unggulan Pertanian di Kota Banjar. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 6(2), 1–11.
- Hudiyanto. (2001). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: PPE UMY.
- Idris, M. (2007). Problem Kemiskinan: Analisis Sebab dan Jalan Keluar. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ilmu Agama*, 62–76.

- Muhtar. (2019). Urgensi Sinergi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Banjar. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, (200), 37–48.
- Prawoto, N. (2009). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. 9(April), 56–68. Publishing, B. (2012). THE MEANING OF POVERTY. 13(3), 210–227.
- Sahdan, G. (2005). Menganggulangi Kemiskinan Desa. Artikel-Ekonomi Rakyat Dan Kemiskinan.
- Suprastyo, D. (2017). Kemiskinan akibat kesenjangan penghasilan. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Titl McCulloch, N., Winters, L. A., & Ilera, X. (2001). Trade Liberalisation and Poverty: A Handbook. In Centre for Economic Policy Research. London: Department for International Development.
- Yulianto Kadji. (2004). Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya. Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNG.
- Sumber berita:
<https://mediaindonesia.com/ekonomi/336792/kostratani-bangun-sdm-pertanian-tangguh-di-banjar-jawa-barat>
<https://banjarkota.go.id/pertanian-tanaman-pangan/>
<https://pangannews.id/berita/1615191224/kota-banjardukung-ketahanan-pangan-dengan-hasil-panen-yang-melimpah/>

Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 15 Juni 1971
 Alamat: Komplek Nata Endah Blok C 72 Kopo Bandung 42225
 No Telp: 08156056420
 Email: ida.widianingsih@unpad.ac.id
 Status: Dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
 Author 3
 Nama: Ramadhan Pancasilawan
 Tempat, Tanggal Lahir: Bekasi 26 Juni 1982
 Alamat: Simpang Asih Jl. Giri Hiang No 5 RT/RW: 001/004 Kel. Pasir Endah Kec. Ujungberung Kota Bandung
 No Telp: 081221271237
 Email: ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
 Status: Dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

BIODATA

Author 1
 Nama: Nada Ulfah Avionita
 Tempat, Tanggal Lahir: Cirebon 3 November 1997
 Alamat: Jl. Ki Ageng Tapa Komplek Perumahan Padi Village No E6, Pejambon, Sumber, Kabupaten Cirebon
 No Telp: 082127362994
 Email: nada16002@mail.unpad.ac.id
 Status: Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
 Author 2
 Nama: Ida.Widianingsih